

GERAKAN SOSIAL-POLITIK *TEMAN AHOK* MENJELANG PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017

Fiero Hutomo Lubis¹, Bandiyah², Piers Andreas Noak¹

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: fierohutomo@gmail.com¹, dyah_3981@yahoo.co.id², andreas.noak@yahoo.com³

ABSTRACT

This research aims to know the form of Social-Politic Movement of Teman Ahok towards Province of Jakarta's Election in 2017. This research uses theory of New Social Movement by Nelson A. Pichardo and uses qualitative descriptive method. Sampling technique that is used is purposive sampling. This research shows that the form of Teman Ahok Social-Politic Movement are : first , Teman Ahok arranged a movement called Satu Juta KTP Untuk Ahok to support Ahok for Jakarta's Election in third quarter of 2015. Teman Ahok was collecting KTP of Jakarta's people and the target is finished. Second, Teman Ahok uses Social Media to gained peoples who want Ahok to becoming Governor of Jakarta. Third, Teman Ahok was connected with four political parties such as Golkar, Hanura, PSI, and Nasdem while collecting KTP in DKI Jakarta. Every political parties has their own agenda to supported Teman Ahok's movement.

Key Words : Jakarta, Election, Teman Ahok, New Social Movement.

1. PENDAHULUAN

Teman Ahok adalah sebuah komunitas yang berawal dari ide dan gagasan sebuah kelompok yang terjadi di masyarakat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kemunculan *Teman Ahok* ini menjadi salah satu bentuk kegelisahan suatu kelompok masyarakat di DKI Jakarta yang merasa ada perubahan yang lebih baik dari pemerintah provinsi melalui kebijakan dan juga pembangunan yang dilakukan. Pada masa itu yakni tahun 2016 adalah periode kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dukungan terhadap Ahok oleh kelompok ini menimbulkan gerakan untuk mengusung Ahok menjadi gubernur pada periode berikutnya.

Komunitas *Teman Ahok* mulai muncul ketika Ahok menggantikan posisi Jokowi sebagai gubernur Jakarta, tepatnya pada

bulan April 2016 atau dua tahun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bersama Jusuf Kalla. Gerakan ini tidak hanya mendukung Ahok pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 saja, namun juga dalam kancah politik Ahok ke depannya. Awalnya komunitas *Teman Ahok* hanya digagas oleh sekumpulan pemuda yaitu Aditya Yogi Prabowo, Muhammad Fathony, Richard Saerang, Amalia Ayuningtyas dan Singgih Widiyastono (Angeline, 2016). Terbentuknya komunitas *Teman Ahok* bukan berdasarkan keinginan Basuki Tjahaja Purnama melainkan murni berasal dari para pendukungnya. Salah satu upaya yang dilakukan komunitas *Teman Ahok* guna mendukung Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 yakni pengumpulan berkas administrasi agar Ahok dapat maju secara

independen atau dengan kata lain tidak melalui mekanisme pencalonan oleh pengusungan partai politik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa terbentuknya *Teman Ahok* berawal dari obrolan ringan antara kelima orang pendirinya. Mereka menginginkan agar Ahok dapat maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Hal yang sebenarnya tidak mudah, mengingat jarang sekali dalam mekanisme pemilihan kepala daerah terdapat calon yang maju melalui jalur independen. Terlebih daerah yang menjadi area pemilihan adalah ibukota DKI Jakarta yang secara peta politik adalah daerah paling strategis untuk mencatut pendukung dalam memetakan Pemilu 2019 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal ini berkaca dari terpilihnya Joko Widodo dalam Pilpres 2014 yang sedikit banyak dipengaruhi oleh meningkatnya elektabilitas Joko Widodo setelah menanganai ibukota Jakarta. Tingginya antusias untuk mendukung Ahok maju secara independent, mendorong Bowo selaku ketua *Teman Ahok* untuk mempelajari berbagai persyaratan yang dibutuhkan guna mengusung Ahok maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 secara independen.

Adapun persyaratan terberat dalam pengusungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan, dimana informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri mengatakan bahwasanya calon gubernur dan wakil gubernur harus mengumpulkan KTP sejumlah 532.213 (Angeline, 2016). Secara

administratif tentu banyak halangan yang dihadapi, terutama dalam proses pengumpulan KTP *Teman Ahok* harus mengalami dua periode pengumpulan dikarenakan pada periode pertama Ahok belum mengusung wakilnya padahal sudah terkumpul KTP sejumlah lebih dari 700 ribu KTP. Kesulitan itu berlanjut ketika dalam pengumpulan periode kedua saat Ahok memutuskan Heru Budi Hartono (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta) menjadi pasangannya di Pilkada DKI Jakarta 2017 (Rautidin, 2016). Hal ini dikarenakan adanya pengumpulan KTP ulang karena pada periode pengumpulan yang pertama, Ahok belum mempunyai wakil. Diakui oleh *Teman Ahok*, terdapat beberapa kesulitan dalam pengumpulan KTP dikarenakan beberapa daerah di Jakarta masih banyak yang tidak secara sukarela menyerahkan KTP. Daerah-daerah tersebut adalah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dimana daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang terkena imbas kebijakan-kebijakan tidak populer semasa Ahok memimpin seperti penghapusan parkir di badan jalan dan penggusuran rumah-rumah ilegal di bantaran kali Ciliwung. Selain itu terdapat tekanan dan intimidasi dari massa partai politik yang tidak mengusung Ahok yang menjadikan beberapa relawan *Teman Ahok* harus mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan KTP.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pilkada DKI Jakarta 2017

Ketentuan Pilkada memang menjadi kontroversi diawal pembukaan Pilkada DKI Jakarta. Agar dapat

mengusung calon independen diperlukan setidaknya 532.213 KTP dukungan dalam pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Hal ini yang membuat para calon memilih kendaraan partai politik yang memiliki kursi cukup agar bisa diusung dan mengikuti Pilkada. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 pemegang kursi terbanyak dan memenuhi kuota untuk bisa mengusung calonnya tanpa harus bergabung dengan partai lain hanya PDI-P. Sehingga sebelum diumumkannya Ahok menjadi calon yang diusung, banyak teka-teki siapakah calon yang akan diusung oleh PDI-P. Terlebih lagi dengan adanya *Teman Ahok*, suara agar Ahok tidak mengambil jalur partai semakin terbuka. Sementara PDI-P tidak seperti Nasdem yang tetap mengusung Ahok meskipun independen. PDI-P memilih mengusung Ahok namun tidak memperbolehkannya melalui jalur independen. Alhasil pada saat-saat terakhir penutupan, Ahok dipasangkan dengan Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan kader dari PDI-P dan diusung oleh empat partai yaitu PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar yang memiliki total kursi 52 di DPRD DKI Jakarta. Total kursi ini merupakan terbanyak diantara pasangan calon yang lain dimana paslon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memiliki total kursi 28 dan paslon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki total kursi 26.

Teman Ahok

Teman Ahok adalah organisasi independen yang dibentuk tahun 2016 dengan tujuan mengusung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur

Independen DKI Jakarta di Pilkada 2017 (Angeline, 2016). Organisasi *Teman Ahok* ini dibentuk oleh lima orang pemuda yang pada saat itu belum mempunyai latar belakang di dunia politik yaitu Amalia Ayuningtyas, Aditya Yogi prabowo, Muhamad Fathony, Singgih Widyastono, dan Richard Saerang. Mereka adalah teman sepermainan yang sama-sama tinggal di DKI Jakarta dan merasakan perbedaan yang lebih baik di DKI Jakarta ketika kepemimpinan Jokowi-Ahok dan ketika kepemimpinan Ahok-Djarot sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Awal mulanya *Teman Ahok* dibentuk untuk mengumpulkan satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta agar Ahok bisa maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 secara independen. *Teman Ahok* menganggap jika Ahok adalah sosok yang tepat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta tanpa harus diusung partai politik. Partai politik dianggap akan menghalangi Ahok yang terkenal bersih dari korupsi. Meskipun mengusung Ahok, nyatanya *Teman Ahok* dibuat sendiri tanpa persetujuan Ahok. Dalam perjalanannya *Teman Ahok* mengumpulkan KTP sebanyak satu juta, melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta. Mereka membuat gerakan KTP Untuk Ahok di berbagai tempat di daerah yang sering dikunjungi masyarakat DKI Jakarta seperti pusat perbelanjaan. Tidak hanya itu, masyarakat yang ingin mengumpulkan KTP juga bisa menghubungi tim *Teman Ahok* agar KTP mereka bisa dijemput sehingga tidak harus menyambangi lokasi-lokasi posko *Teman Ahok*.

New Social Movement

Teori gerakan sosial baru (*new social movement*) merupakan teori yang menjelaskan perubahan karakter dari gerakan sosial. Oman Sukmana (2016:117) menerangkan bahwa Gerakan ini menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca-industri (*post-industrial*) di Amerika Utara dan Eropa Barat. Dalam banyak hal, klaim identitas adalah ciri paling khas dari Gerakan Sosial Baru (GSB). Selain itu struktur dari gerakan sosial baru didefinisikan oleh keragaman (pluaralitas) cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi serta heterogenitas dari basis sosial mereka. Dikarenakan adalah transformasi diri yang tidak terbatas, bentuk-bentuk aksi dan gerakan sosial menapaki banyak jalur dan menyuarkan aneka kepentingan.

Gerakan sosial baru juga mempunyai pengertian bahwa politik tidak selamanya soal kepentingan orang banyak. Sebagaimana yang diterangkan Enrique Larana, Hank Johnston, dan Joseph R. Gustfild (1994) Hubungan antara individu dan kolektivitas kabur, gerakan-gerakan ini lebih sering dilaksanakan dengan kegiatan individual (*individual actions*) dibanding melalui kelompok termobilisasi. Selain itu gerakan sosial baru beranggapan bahwa kepentingan personal juga harus dimasukkan dalam kebijakan politik atau *personal is political* sebagai contoh bahwa orientasi seksual seseorang merupakan hak yang harus diperjuangkan. Gerakan sosial baru nantinya akan membentuk sebuah identitas politik tersendiri dari

anggotanya, contohnya adalah gerakan LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) yang menginginkan adanya perhatian pemerintah terutama pengakuan identitas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Adapun contoh lainnya adalah kelompok aktivis lingkungan hidup atau lebih dikenal dengan nama *green movement* serta gerakan sosial lainnya yang memiliki fokus menekan pemerintah untuk lebih memberi perhatian tanpa ada kepentingan materiil didalamnya.

Menurut Pichardo seperti yang dikutip Sukmana (2016:119), paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigm Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*). Karakteristik khusus dari Gerakan Sosial Baru dapat dilihat dari empat aspek yakni Tujuan dan Ideologi, Taktik, Struktur, dan Partisipan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dengan objek yang ada dan menghubungkannya melalui bingkai teoritis yang sudah ditentukan oleh peneliti (Sugiono:2007). Narasumber dari penelitian ini ditentukan dengan pengambilan teknik *sampling* yakni *purposive* sampling. Peneliti memilih narasumber yaitu Aditya Yogi Prabowo selaku mantan ketua *Temannya Ahok*, Muhammad Fathoni selaku mantan wakil ketua *Temannya Ahok*, dan Jojo Lamsihar Manalu selaku politisi PDI-P di kota Jakarta Timur. Pertanyaan yang diajukan disusun sesuai permasalahan

terkait gerakan sosial-politik *Temannya Ahok* dalam mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Teknik analisis data dari penelitian menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip Sugiono (2012:243) adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, dan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terletak di sebelah utara pulau Jawa. Berada di muara Ciliwung Teluk Jakarta, DKI Jakarta berada pada dataran rendah ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Provinsi DKI Jakarta memiliki status khusus sebagai Ibukota Negara. Provinsi ini memiliki pembagian di bawahnya berupa lima kota dan satu kabupaten. Kelima kota itu yakni Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Selatan. Satu kabupaten dibawah Provinsi yaitu kabupaten Kepulauan Seribu yang berada terpisah dengan pulau Jawa dan berada terletak di utara provinsi. Luas sebesar 7.659,02 km² yang dimana terdiri dari luas daratan 661,52 km² dan luas perairan 6.997,50 km².

Profil Basuki Tjahaja Purnama

Kiprah politik Basuki Tjahaja Purnama dimulai dengan menjadi Bupati Belitung Timur mendampingi Khairul Effendi tahun 2005-2006. Setelah itu Basuki kalah dalam pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007 dan akhirnya masuk ke Partai Golkar pada tahun 2008

untuk mengikuti ajang pemilihan legislatif. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR RI Komisi I periode jabatan 2009-2014. Pada tahun 2012 beliau pindah ke Partai Gerindra dan mendampingi Joko Widodo sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2012). Pasangan Jokowi-Ahok pun menang dan memimpin Jakarta sampai tahun 2017. Ditengah periode jabatan, Joko Widodo yang ikut dalam kancah Pemilihan Presiden tahun 2014 dan memenangkannya bersama Jusuf Kalla akhirnya membuat Basuki naik menjadi Gubernur didampingi oleh kader PDI-P Djarot Syaiful Hidayat sampai tahun 2017. Pasangan ini kalah dalam Pilkada 2017 dan menyebabkan Basuki dipenjara karena kasus penistaan agama sehingga posisinya digantikan Djarot hingga masa bakti habis.

Profil *Temannya Ahok*

Temannya Ahok adalah organisasi yang dibentuk pada Mei 2016. Menurut penjelasan Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua *Temannya Ahok*, organisasi ini dipelopori oleh Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua, Muhammad Fathony selaku Wakil Ketua, Amalia Ayuningtyas selaku Juru Bicara, Singgih Widyastono selaku Juru Bicara, dan Richard Saerang selaku koordinator relawan. Mereka berlima bertemu dalam tim pemenang Jokowi-JK pada tahun 2014 sebagai relawan di tingkat daerah DKI Jakarta.

Memiliki kantor di Wisma Pejaten, *Temannya Ahok* muncul sebagai bentuk keresahan kelima orang pendiri terhadap kepuasan mereka pada Ahok yang

menjabat Gubernur pada saat itu. Mereka pun menggalang massa di daerah DKI Jakarta untuk mengumpulkan KTP sebanyak satu juta agar Ahok bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur melalui jalur independen. Gerakan ini dinamakan Satu Juta KTP Untuk Ahok. Tujuan dari masuknya Ahok dengan jalur independen agar beliau tidak ditunggangi kepentingan politik dari partai politik, sesuai informasi dari Aditya Yogi Prabowo.

Persiapan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017

Masa persiapan menuju Pilkada 2017 jadi ajang pembuktian bagi seluruh partai dalam menghadapi Pemilu serentak 2019. Isu-isu politik pun ramai lewat diantara media-media yang ada. Harga politik di DKI Jakarta meningkat lebih besar dari sebelumnya. Nama-nama yang muncul dalam bursa Cagub dan Cawagub pun bermunculan seperti petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan anak dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentunya calon dari partai Gerindra yang pada saat tahun 2016 belum dimunculkan bursanya.

Isu agama jadi isu utama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan akhirnya menentukan hasil dari pilkada tersebut. Tentunya isu ini menerpa satu-satunya calon non-muslim yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan etnis Tionghoa dan beragama Kristiani. Kecaman datang dari kelompok organisasi masyarakat berbasis agama dan juga beberapa ulama besar yang ada di ibukota.

Tapi tidak sedikit juga masyarakat di DKI Jakarta yang ingin agar Ahok bisa meneruskan masa baktinya sebagai Gubernur. Karena hal inilah maka terbentuk kelompok-kelompok relawan di masyarakat DKI Jakarta, salah satunya Teman Ahok.

Gerakan Satu Juta KTP Untuk Ahok

Dengan mengusung Ahok sebagai Calon Gubernur Independen maka sudah pasti perlu gerakan dengan tujuan yang sama dikarenakan persyaratan untuk maju sebagai calon Gubernur independen yang tidak semudah menggunakan jalur partai. Dari keterangan Aditya Yogi Prabowo, maka partisipan gerakan yang dimotori *Teman Ahok* mayoritas adalah pendukung Jokowi pada saat beliau memenangkan Pilpres 2014. Jokowi dan Ahok adalah pasangan calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2013. Pasca Jokowi memenangkan Pilpres 2014 maka Ahok melanjutkan estafet kepemimpinannya di DKI Jakarta sebagai Gubernur sekaligus mengangkat Djarot Syaiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur. Djarot Syaiful Hidayat dikenal sebagai salah satu kader PDI-P DKI Jakarta dan juga merupakan Ketua Bidang Keanggotaan DPP PDI-P.

Untuk mengusung Ahok sebagai calon Gubernur Independen maka diperlukan adanya calon wakil gubernur non-partai yang akan mendampingi Ahok. Ahok sendiri sudah keluar dari Partai Gerindra pada saat akan mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sehingga nama Djarot tidak dipasangkan oleh *Teman Ahok* untuk mendampingi Ahok melalui jalur yang mereka usung. Hal ini akan berpengaruh ke

aspek lainnya yaitu taktik. Pada periode gerakan *Teman Ahok*, pengumpulan KTP mengalami 2 periode pengumpulan.

Periode pertama pengumpulan KTP berlangsung selama 9 bulan dan nyatanya berhasil melebihi persyaratan KPU untuk pengusungan calon independen yakni sebesar 532.000 KTP. Bahkan pada periode pengumpulan pertama *Teman Ahok* berhasil mencapai target satu juta KTP bahkan lebih. Namun dikarenakan pendapat dari salah satu tokoh nasional yakni Yusril Ihza Mahendra dimana beliau menganggap KTP yang dikumpulkan *Teman Ahok* tidak sah karena belum menyertakan wakil Gubernur yang akan diusung, *Teman Ahok* memulai lagi pengumpulan KTP dari awal.

Periode kedua pengumpulan KTP berjalan secara masif dikarenakan adanya hambatan dari KPU sehingga masyarakat dinilai lebih antusias dalam mengumpulkan KTP di periode kedua. Seperti yang dikatakan oleh Aditya Yogi Prabowo (Mantan Ketua *Teman Ahok*).

Pada periode kedua pengumpulan ada nama Heru Budi yang menjadi Calon Wakil Gubernur mendampingi pak Basuki Tjahaja Purnama. Salah satu Pegawai Negeri Sipil yang dinilai mempunyai kinerja baik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, tidak memiliki afiliasi politik dengan partai mana pun. Pada akhirnya pengumpulan KTP oleh *Teman Ahok* berhasil melewati angka sejuta pada saat periode kedua pengumpulan.

Kampanye Mendukung Ahok Di Social Media

Salah satu keberhasilan *Teman Ahok* bisa mengumpulkan massa DKI Jakarta dikarenakan *maintenance* media sosial yang baik dari tim *Teman Ahok* seperti yang diungkapkan Muhammad Fathoni. Keberhasilan suatu Gerakan Sosial bisa dilihat dari taktik yang akan dijalankan. Peneliti pun melihat bahwa akun *instagram* milik *Teman Ahok* yang saat ini berubah nama menjadi *Sejuta Teman* mempunyai pengikut lebih dari 206 (dua ratus enam) ribu. Akun media sosial ini lebih sedikit pengikutnya dibanding sosok yang diusung yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang memiliki pengikut sebanyak lebih dari 3 (tiga) juta pengikut. Keberhasilan dari kampanye media sosial dianggap oleh *Teman Ahok* adalah faktor pendukung terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam pengumpulan KTP. Selain itu beberapa mantan pejabat tinggi dan aktris juga ikut membantu mengumpulkan KTP bagi *Teman Ahok* seperti yang diungkapkan Muhammad Fathoni.

Dukungan Aktor Politik

Dari hasil wawancara peneliti, maka bisa dibilang *Teman Ahok* cenderung spontan dan demokratis dalam pemilihan pengurusnya. Meskipun Aditya Yogi Prabowo adalah ketua *Teman Ahok*, namun sang juru bicara Amalia Ayuningtyas bisa dibilang sebagai sosok paling populer yang paling banyak dikenal masyarakat. Hal ini tidak terlalu bermasalah didalam internal struktur organisasi *Teman Ahok* karena sesuai ideologi dari gerakan, struktur kepengurusan memang tidak bersifat permanen. Semua sifat ini dipelajari

dari masa lalu, dimana struktur harus terbuka dan desentralis.

Selain pengurus inti yang dikenal oleh masyarakat, *Teman Ahok* juga mempunyai relawan yang tidak bisa dianggap sebelah mata dalam menggerakkan massa di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Aditya Yogi Prabowo. Meskipun mengatakan adanya pemodal awal, namun keterangan dari narasumber tidak mengatakan akan proses pengembalian modal awal dari penghasilan penjualan *merchandise* yang dikatakan sebagai satu-satunya sumber dana kampanye *Teman Ahok*. Kedekatan *Teman Ahok* dengan CEO dari Cyrus Network dikatakan sebagai hal yang membantu segala sesuatu dalam pergerakan *Teman Ahok* secara finansial dan juga secara hukum. Hal ini karena tidak ada pengurus *Teman Ahok* yang memiliki latar belakang politik.

Teman Ahok memang secara pembentukan awal dari struktur tidak dibantu oleh politisi dan hal ini juga dirasakan oleh narasumber peneliti Jojor Lamsihar Manalu (PDI-Perjuangan).

5. KESIMPULAN

Terdapat Gerakan Sosial-Politik yang terjadi oleh *Teman Ahok* dimana bentuk dari gerakan sosial-politik tersebut adalah pengumpulan satu juta KTP untuk Ahok. Gerakan ini meraih simpati masyarakat DKI Jakarta dalam dua periode pengumpulan di tahun 2015-2016. Selain itu Gerakan Sosial-Politik terjadi dalam kampanye *Teman Ahok* melalui media sosial dan

media daring lainnya untuk membantu menyebarkan informasi terkait dukungan agar Ahok maju secara independen.

Bentuk Gerakan Sosial-Politik *Teman Ahok* dilandaskan atas empat karakteristik Gerakan Sosial Baru yaitu Ideologi, Taktik, Struktur, dan Partisipan. Dari keempat karakteristik ini, unsur Taktik menjadi modal utama Gerakan Sosial-Politik *Teman Ahok* dimana untuk menjangkau banyaknya masyarakat yang mau turut terlibat dalam mengukung Ahok, *Teman Ahok* menggunakan kampanye Media Sosial yang terbukti jitu dalam menarik perhatian masyarakat DKI Jakarta. Selain itu temuan menarik lainnya adalah adanya Pembina dalam struktur kepengurusan *Teman Ahok* yang tidak lain adalah Hasan Nasbi selaku pendiri dan CEO Cyrus Network yang juga adalah pemodal awal dari komunitas *Teman Ahok* dengan jumlah nominal yang diberikan sebesar lima ratus milyar rupiah dan dikatakan oleh Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua *Teman Ahok* sebagai modal *set-up*.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bungin, Burhan (2007) *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Enrique Larana, Hank Johnston, dan Joseph R. Gustfield. (1994). *New*

- Social Movement : From Ideology to Identity*. Temple University Press.
- Hegel, George Wilhelm Friedrich. (2012). *Filsafat Sejarah* (Terj.). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Johnson, Agnone dan McCharty. (2005), *Movement Organization, Synergistic Tactic and Environmental Public Policy*. P. Oxford University Press.
- Kreimers, L.J.B. (1987). *Sosiologi Umum*. Jakarta : Bina Aksara
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong J (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Kosda Karya.
- Sartono Kartodirjo. (1992). *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dikutip dari Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat.
- Singh, Rajendra. (2001). *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publikations India, Ltd.
- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru* (Terj.). Yogyakarta: Resist Book.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang : Intrans Publishing.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Paine, Thomas. (1775). *Common Sense : the Classic Political Book*. USA.
- Tarrow, Sidney. (1994). *Power In Movement*. Cambridge U Press
- Angeline, Mia. (2016). *Symbolic Convergence In A Social Movement: A Case Of Pengumpulan Satu Juta KTP By Teman Ahok*. Universitas Bina Nusantara.
- Rautidin, M. Sidi. (2016). *Fenomena Teman Ahok Menghangatkan Politik Partai*. UIN Raden Inten Lampung.
- Hadi, Aulia. (2016). *Migration, Ethnicity And Local Politics : The Case Of Jakarta, Indonesia*. Indonesian Institute of Sciences.
- Pichardo, Nelson A. (1997). *New Social Movements : A Critical Review*. *Annual Review of Sociologi*, vol. 23 Issue 1, p.411
- Sartika, Vivi Ayu. (2015). *Diplomasi Publik John Lennon Terhadap Kebijakan Presiden Nixon Dalam Kasus Perang Vietnam*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wahyudin, Eko Aji. (2017). *Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website :

- KPU. (2017). *Hasil Penghitungan Suara Pilgub DKI Jakarta 2017*. http://kpujakarta.go.id/view_berita/penghitungan-suara-pilgub-dki-jakarta-2017. Pada tanggal 4 Januari 2018
- KPU. (2017). *Laporan Rekap Pilkada 2017*. <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/laporanRekap/>. Pada tanggal 15 januari 2019

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2017

Skripsi, Disertasi, Tesis, dan Artikel Ilmiah :

